

**STRATEGI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS SE-KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

ANDRI FAHLEVI

NPP. 30.0006

Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Program Studi Keuangan Publik

Email: andrifahlevi188@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dadang Suwanda, SE, M.Ak, MM, CA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Research on the implementation of education in high schools in Kuta Alam District with the support of education funding through BOS (Operational Assistance Funds) aligns with the Indonesian Constitution of 1945, Article 31, Paragraph 4, which mandates 20% of the budget for education and a nationally implemented education system. Kuta Alam District, as one of the districts with a focus on educational facilities, especially for high school level, requires a suitable strategy for optimizing the use of BOS funds according to priorities. **Purpose:** The objective of this research is to identify the strategies in distributing BOS funds, the challenges faced, and the efforts made in implementing education in high schools in Kuta Alam District, undertaken by the Education and Culture Agency of Banda Aceh City.. **Method:** This study adopts an inductive approach, with the researcher serving as the research instrument. Data is collected through interviews, observations, and documentation, which are subsequently analyzed. **Result:** The renewal of libraries to promote literacy is one simple aspect that can be observed. However, the lack of time spent by students on reading books is a consequence of BOS funds. The improvement of educational facilities is a primary focus in the Strategic Plan of the Education and Culture Agency of Banda Aceh City 2023-2026, aiming to achieve quality, relevant, and competitive education while meeting the needs of educational facilities. Unfortunately, some individuals have been found to misuse the BOS funds intended for education in high schools in Kuta Alam District. They attempt to manipulate payment evidence, leading to discrepancies in prices compared to the ARKAS format. It is crucial to remember that the primary purpose of distributing BOS funds is not for personal interests. **Conclusion:** In order to enhance student competency, high schools in Kuta Alam District adhere to Governor of Aceh Regulation Number 1 of 2012 and Minister of Education and Culture Regulation Number 63 of 2022 as the legal foundation. Through BOS funds, school infrastructure and facilities are improved to enhance student skills. It is important for each school to carefully manage the receipt of BOS funds to prevent misuse by irresponsible individuals. **Keywords:** Education; BOS funds; Education and Culture Agency of Aceh City; Kuta Alam District. **Keywords:** Education; BOS Fund; Education and Culture Office of Banda Aceh City; Kuta Alam District

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan di SMA pada Kecamatan Kuta Alam dengan bantuan anggaran pendidikan melalui Dana BOS sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dengan anggaran untuk pendidikan 20 persen dan sistem pendidikan dilaksanakan secara nasional. Kecamatan Kuta Alam sebagai salah satu kecamatan dengan penggunaan fasilitas pendidikan khususnya untuk jenjang SMA sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam pengoptimalan penggunaan Dana BOS sesuai prioritas. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini, adalah mengetahui strategi dalam penyaluran Dana BOS, hambatan yang dilalui, dan upaya dalam mengatasi untuk pelaksanaan pendidikan di SMA Pada Kecamatan Kuta Alam yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. **Metode:** Dengan pendekatan induktif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan peneliti sebagai instrument penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. **Hasil/Temuan:** Pembaharuan perpustakaan dalam rangka menggalakkan gerakan literasi adalah salah satu hal sederhana yang dapat diamati. Namun, minimnya waktu yang dihabiskan oleh para siswa untuk membaca buku terkait dengan konsekuensi Dana BOS. Desain perbaikan fasilitas pendidikan merupakan salah satu fokus utama dalam Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh 2023-2026, dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan kompetitif serta memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan. Sayangnya, beberapa oknum ditemukan melakukan penyalahgunaan Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk pendidikan di SMA Kecamatan Kuta Alam. Mereka mencoba mengelabui bukti pembayaran yang mengakibatkan perbedaan harga dengan format yang ada di ARKAS. Penting untuk diingat bahwa tujuan utama penyaluran Dana BOS bukanlah untuk kepentingan pribadi. **Kesimpulan:** Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa, sekolah-sekolah di SMA se-Kecamatan Kuta Alam mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 sebagai dasar hukum. Melalui Dana BOS, sarana dan prasarana sekolah ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Penting bagi setiap sekolah untuk mengatur penerimaan Dana BOS secara ketat, agar dapat menghindari penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kata kunci: Pendidikan; Dana BOS; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Aceh; Kecamatan Kuta Alam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting di setiap negara dan pelaksanaannya dijamin oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat 4 Konstitusi 1945, yang mengharuskan alokasi 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai faktor fundamental bagi individu dan sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang optimal di negara ini. Salah satu kebijakan dan inovasi yang dilakukan adalah program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), yang berperan

penting dalam mendukung pendidikan dan merupakan bentuk alokasi anggaran sesuai dengan Konstitusi 1945. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur dan menentukan aspek teknis terkait petunjuk dan pengelolaan dana BOS melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Pengelolaan pendidikan di Indonesia dilakukan dengan mendekonsentrasikan wewenang kepada pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi dan kondisi di wilayah masing-masing. Namun, Kota Banda Aceh sebagai salah satu pemerintah daerah menghadapi tantangan dan pelaksanaan sistem pendidikan yang kurang optimal. Tingkat kelulusan ujian nasional SMA yang rendah di Kota Banda Aceh disebabkan oleh kualitas pendidikan yang rendah dan kualifikasi guru yang tidak memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Program Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas (PECAPP) menyoroti distorsi perencanaan sebagai salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Aceh lebih fokus pada pengembangan infrastruktur namun kurang memperhatikan aspek kualitas pendidikan yang penting. Hal ini mengakibatkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai namun kurangnya kualitas pendidikan secara keseluruhan di Kota Banda Aceh.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu bukti rendahnya mutu pendidikan di Kota Banda Aceh ditandai dengan hanya terdapat 1 (satu) orang dari 5 (lima) orang guru yang bersertifikasi di seluruh jenjang di Kota Banda Aceh. Angka dan data juga menunjukkan bahwa rasio kualitas guru di Aceh berada pada urutan ke 28 secara nasional. Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah berupaya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan melalui serangkaian kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah tentang penyaluran Dana BOS untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah. Untuk dapat mengetahui tentang besaran Dana BOS dari Kota Banda Aceh pada jenjang sekolah menengah (SMA).

Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan Pemerintah guna mendukung pelaksanaan pendidikan di Kota Banda Aceh sesuai dengan yang tertuang pada tabel 1.1 di atas menunjukkan angka sebesar Rp. 25.997.867.920 untuk SMA Negeri dan Sebesar Rp. 3.418.272.000 untuk SMA swasta dalam jangka waktu 2 tahun yang terbagi kedalam 6 tahapan. Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada satuan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta yang ada di lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan kriteria dan ketentuan – ketentuan yang teratur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait petunjuk teknis dan tata cara pengelolaan dana Bantuan BOS. Kota Banda Aceh memiliki setidaknya 29 SMA yang terbagi kedalam 9 (Sembilan) Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah administrasi Kota Banda Aceh.

Terdapat 9 (sembilan) sekolah pada tingkat SMA yang ada di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang terdiri atas 6 (enam) SMA negeri dan 3 (tiga) SMA swasta. Dari data yang tersaji dalam tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa SMAN 3 Banda Aceh menjadi sekolah dengan total peserta didik terbanyak dengan 994 orang yang juga diikuti oleh jumlah rombongan belajar, guru, serta pegawai yang tergolong paling banyak diantara SMA di Kecamatan Kuta Alam lainnya. Sekolah dengan jumlah peserta didik terbanyak selanjutnya ada di SMAN 4 Banda Aceh dengan total 864 orang dan diposisi selanjutnya adalah SMAN 2 Banda Aceh dengan total peserta didik sebanyak 719 orang. Sedangkan untuk predikat SMA dengan jumlah peserta didik paling sedikit terdapat pada SMAS Granada PGRI dengan jumlah peserta didik sebanyak 17 orang saja.

Berpatokan pada data yang tersaji dalam tabel 1.3 dan tabel 1.4 menunjukkan bahwa tiap – tiap SMA yang ada di Kecamatan Kuta Alam memiliki keunggulan dan kepentingan yang berbeda. Bisa

dipahami bahwa SMA dengan jumlah fasilitas/infrastruktur yang relatif banyak dan memiliki jumlah peserta didik dan pegawai yang juga banyak kemungkinan cenderung menggunakan Dana BOS untuk operasional serta pemeliharaan dari prasarana yang sudah dimiliki. Selain itu, sekolah juga perlu untuk mempertimbangkan bagaimana SDM yang ada dapat terpenuhi seluruh hak dan kewajibannya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sekolah yang memiliki infrastruktur/fasilitas yang minim dan peserta didik serta pegawai yang juga relatif sedikit yang cenderung menggunakan Dana BOS untuk membangun serta melengkapi fasilitas/infrastruktur maupun sarana prasarana yang dianggap masih kurang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa referensi penelitian terdahulu yang digunakan dalam rangka menunjang penelitian ini yakni penelitian mengenai Analisis Strategi Penyaluran Dana ZIS pada Lembaga Amil ZAKAT Dompot Dhuafa Republika (Machmudah & Iswanaji, 2021) yakni penelitian kegiatan penyaluran dana ZIS pada lokus penelitian yang sudah dilaksanakan dengan efektif. Adapun bantuan yang disalurkan berupa pelatihan dan pembentukan kecakapan yang dapat memberdayakan penerima manfaat sehingga kedepannya dapat berdikari sendiri. Penelitian kedua yang terkait Optimalisasi Peran Widyaiswara dalam Pelaksanaan Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan (Triarti, 2018) sebagai strategi dalam memberdayakan widyaiswara dalam sebagai praktisi pengajar untuk ditingkatkan kompetensi yang dimiliki sehingga kebermanfaatannya dapat berlangsung dengan baik. Hal yang serupa dengan optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakat pesisir di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih sama bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan konsep pembangunan berkelanjutan (Pararang, Gosal, & Kimbal, 2017). Terakhir, dengan lokus yang berbeda tetapi tetap dengan optimalisasi bahwasanya pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan yang masih sama untuk memberdayakan masyarakat desa dengan mata pencaharian usaha pertanian (Darwis & Rusantra, 2011)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji pada pelaksanaan penyaluran Dana BOS dengan strategi SWOT sehingga dapat diidentifikasi kelebihan, kekurangan, peluang, dan hambatan dalam penyaluran Dana BOS di lingkup Kecamatan Kuta Alam.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyaluran Dana BOS di SMA se-Kecamatan Kuta Alam, menganalisis hambatan dalam penyaluran Dana BOS di SMA se-Kecamatan Kuta Alam, dan menganalisis upaya mengatasi hambatan penyaluran Dana BOS di SMA se-Kecamatan Kuta Alam.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif terkait dalam meneliti dan memproses data-data yang berupa kata dan gambar untuk ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpul diproses dengan teknik triangulasi data. Data yang telah diolah

yang diverifikasi untuk dapat ditemukan kesimpulan dengan kredibilitas yang akurat (Miles & Huberman, 2017)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan program DP3 di Kecamatan Kubu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya dari KPU Kabupaten Karangasem

3.1. Strategi dalam Penyaluran Dana BOS dalam Pelaksanaan Pendidikan di Tingkat SMA di Kecamatan Kuta Alam

Dalam pemanfaatan Dana BOS di Kota Banda Aceh yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bantuan Operasional Sekolah, adanya pengaturan dalam transfer yang diambil dari 25 % Kas Aceh yang diberikan selama empat triwulan ke satuan tingkat pendidikan dasar. Adapun dasar hukum menjamin keamanan transfer dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Begitu juga yang diterima pada pelaksanaan pendidikan di Tingkat SMA di Kecamatan Kuta Alam, sehingga pemenuhan kebutuhan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya kebijakan dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagai sekuritas penyaluran Dana BOS tepat tersampaikan bagi penerima Dana BOS secara legal. Dengan adanya penyaluran Dana BOS sebagai bentuk kewajiban pemerintah sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan campur tangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disebutkan pula dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 amandemen ke-4 yang mengedepankan minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kelalaian dalam penyaluran yang diterima oleh beberapa oknum akibat ketidakjujuran. Hal ini disampaikan oleh Pengelola Dana BOS di SMA se-Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yakni Bapak Hamdani, S.Pd. Padahal telah dibuat aplikasi program ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam menginput RKAS oleh Tim BOS sekolah. Hal ini menunjukkan SDM dalam pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya memiliki integritas dalam mewujudkan transparansi yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Banda Aceh, Bapak Muhibbul Khibri, S.Pd. Selain itu, ditinjau dari siswa SMA termasuk siswa SMA se-Kecamatan Kuta Alam belum mampu memanfaatkan fasilitas dari Dana BOS. Hal ini disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, bapak Syarwan Joni, S.Pd, M.Pd. Hal yang sederhana yang dapat dilihat dari pembaharuan perpustakaan untuk menggalakkan gerakan literasi. Minimnya para siswa untuk meluangkan waktu membaca buku sebagaimana setiap bahan bacaan merupakan konsekuensi dari Dana BOS. Desain yang dibuat dalam memperbaharui fasilitas pendidikan tercantum pada tujuan pertama pada Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh 2023-2026 yakni terwujudnya pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing dengan sasaran menyangkut pada pemenuhan fasilitas edukasi.

3.2. Faktor Penghambat Beserta Upaya dalam Mengatasi untuk Program Penyaluran Dana BOS dalam Pelaksanaan Pendidikan di Tingkat SMA Kecamatan Kuta Alam

Terdapat temuan dari beberapa oknum yang menyelewengkan penyaluran Dana BOS yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pendidikan di SMA Kecamatan Kuta Alam. Dengan mengelabui bukti pembayaran yang ketika disandingkan dengan format di ARKAS terdapat selisih beda harga.

Esensi dari penyaluran Dana BOS bukan diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Peninjauan dari kesadaran siswa SMA untuk belajar lebih giat dengan memanfaatkan fasilitas guna mendukung kegiatan akademik masih ditinjau kurang. Kurangnya motivasi untuk giat belajar seperti memanfaatkan perpustakaan, perpustakaan sebagai target dalam peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sekolah untuk meningkatkan literasi siswa. Tujuannya kembali lagi supaya setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada kecemburuan dengan daerah lain yang mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.

ARKAS sebagai aplikasi dalam pelaporan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk menjamin ketepatan pelaporan penyaluran Dana BOS tepat sasaran. Terbukti bahwasanya ARKAS masih bisa dikelabui oleh beberapa oknum pengelola sehingga dana tidak tersalur dengan tepat dan yang benar-benar membutuhkan. Peningkatan bagian verifikasi anggaran disertai bukti konkrit sebagai salah satu upaya untuk memberantas tindakan penyelewengan penggunaan anggaran untuk kepentingan personalia.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa penyaluran Dana BOS pada tingkat SMA se-Kecamatan Kuta Alam yang masih terdapat beberapa pelanggaran. Penyaluran target penerima Dana BOS belum teraktualisasi mendekati target meskipun dengan jumlah SMA se-Kecamatan Kuta Alam terbanyak dengan total sekolah ada 9 sekolah. Hal ini dipengaruhi dari SDM yang mengelola Dana BOS untuk tetap tepat tersampaikan pada penerima target dana BOS. Selain fasilitas sekolah yang belum lengkap mulai dari perpustakaan hingga penyediaan giat ekstrakurikuler dalam menyalurkan bakat siswa. Sepatutnya masalah ini dapat teratasi sehingga prinsip pemertaan pendidikan benar terpenuhi.

IV. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana BOS untuk pelaksanaan pendidikan tingkat SMA di Kecamatan Kuta Alam dapat ditinjau dari melalui analisis SWOT mengenai strategi yang digunakan.

1. S-O (Strength-Opportunities)

Dengan adanya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 sebagai landasan legalistik untuk sekolah di SMA se-Kecamatan Kuta Alam untuk bisa meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam meningkatkan kompetensi siswa

2. W-O (Weakness-Opportunities)

Dengan adanya muncul sarana prasarana yang ditingkatkan melalui dana BOS untuk meningkatkan keterampilan siswa sehingga tiap sekolah lebih ketat dalam mengatur penerimaan Dana BOS untuk menjuru kepentingan non-pribadi sehingga terhindarkan dari beberapa oknum yang hendak menyelewengkan penyaluran Dana BOS

3. S-T (Strength-Threats)

Mengingat ancaman dari para oknum mengenai penggunaan Dana BOS yang tidak semestinya perlu ditindak tegas berdasarkan adanya peraturan yang berlaku dan peninjauan kembali pelaporan keuangan dari ARKAS

4. W-T (Weakness-Threats)

Pentingnya penanaman integritas sebelum mengembankan suatu tanggung jawab yakni sebagai pengelola dana BOS sehingga ancaman kedepannya berupa oknum dapat diminimalisir dan ditindak tegas apabila ada temuan di kemudian hari

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian serta referensi masih kurang yang mendasar mengenai penyaluran Dana BOS pada tingkat SMA se-Kecamatan Kuta Alaam

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan memperoleh referensi lebih banyak untuk mendukung kebaruan dari penelitian berikutnya

v. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Idr. Dadang Suwanda, SE, M.Ak, MM, CA. yang senantiasa membimbing penulis dalam penelitian ini.

vi. DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, V., & Rusastra, I. W. (2011). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(2), 125–142.
- Machmudah, A. A., & Iswanaji, C. (2021). Analisis Strategi Penyaluran Dana ZIS Pada Lembaga AMIL ZAKAT Dompot Dhuafa Republika. *TAFACQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyyah*, 6(2), 1–10.
- Pararang, B. R., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triati, E. (2018). Optimalisasi Peran Widyaiswara dalam Pelaksanaan Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan. *Quantun: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 42–50.